

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**RAJA HENITIA SHAFITRI  
NIM : 17622055**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi

OLEH

**RAJA HENITIA SHAFITRI  
NIM : 17622055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

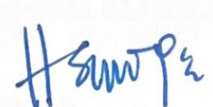
NAMA : RAJA HENITIA SHAFITRI  
NIM : 17622055

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

  
Salihi, S.E., M.Ak  
NIDN. 8823501019 /Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,

  
Hasnarika, S.Si., M.Pd  
NIDN. 1020118901 /Asisten Ahli

Menyetujui

Ketua Program Studi

  
  
Hendy Satria, SE., M.Ak  
NIDN. 1015069101 /Lektor

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : RAJA HENITIA SHAFITRI  
NIM : 17622055

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan  
dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima.

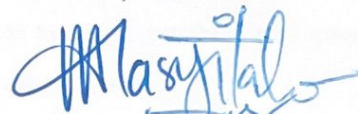
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



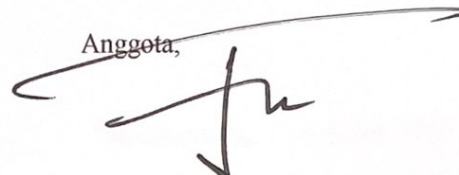
Salihi, S.E., M.Ak  
NIDN. 8823501019/Asisten Ahli

Sekretaris,



Masyitah As Sahara, S.E., M.Si  
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Anggota,



Fauzi, S.E., M.Ak  
NIDN. 8928410021/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang,

Ketua



Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak.CA  
NIDN. 1029127801/Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Raja Henitia Shafitri  
NIM : 17622055  
Tahun Angkatan : 2017  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022

Penyusun



**RAJA HENITIA SHAFITRI**  
NIM : 17622055

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya panjatkan kepadamu Ya Allah, kerana sudah menghadirkan orang-orang baik di sekeliling saya. Yang selalu memberi dukungan dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

*Kupersembahkan karya skripsi ini kepada semua orang yang saya sayangi:*

### ***“Orang Tua Tercinta”***

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Raja Shafariuddin dan Ibunda tercinta Martiana, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kerana sudah membesarkan, mendidik, mensupport, dan mendoakan yang terbaik untuk saya, yang selalu mensupport dan memberi arahan yang baik untuk saya.

### ***“Adikku”***

Ucapan banyak terima kasih kepada adikku, Raja Nurliza Shafira atas semua doa, semangat, dukungan dan perhatian yang tak terhingga selama ini.

### ***“Almamaterku”***

STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG tempat aku menuntut ilmu.

**HALAMAN MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah :5)

*“Even if the darkness falls again and a higher wall blocks my way, I’m not afraid of tomorrow because I won’t be alone.”*

(Wanna One)

*“You can find some friends out there, but found a true friends is a difficult one.”*

(yy, oct 2016)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.



5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Salihi, S.E., M.Ak, selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, arahan, dan saran.
7. Ibu Hasnarika,S.Si.,M.Pd, selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, arahan, dan saran.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Pimpinan dan Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Nenek Latifah Razak tercinta, Keluarga Besar Raja Abdul Razak (Alm) dan Nenek Agustina tercinta, Keluarga Besar Zainal Abidin (Alm) yang sudah banyak mensupport saya.
11. Sepupu-sepupu saya Raja Putri, Raja Putra, Meri, Shinta, Retno, Acha, Ulan, dan Adek Mecca tersayang yang sudah banyak memotivasi saya.
12. Teman- teman seperjuangan Maya, Vio, Valent, Tiffany, Azri, Haiqal, Ichsan, Kak Fiqih, dan Enjalika, yang terus menemani saya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
13. Orang-orang baik Kak Dwika, Kak Syafna, Kak Erica, Bang Sukma, Bang Sahreza, Bang Riza, Rido dan rekan-rekan UPTD PPI yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Daniel, Bobby, Huta, dan Soobin atas perhatian dan

dukungan yang tiada henti agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Teman-teman Sanggar Seni Kledang Tanjungpinang, atas doa dan dukungan untuk saya.

15. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022  
Penulis

**RAJA HENITIA SHAFITRI**  
**NIM : 17622055**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xivv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah .....	8
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Akuntansi .....	12

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik .....	12
2.1.3 Organisasi Sektor Publik.....	13
2.1.4 Akuntansi Pemerintahan .....	15
2.1.5 Aset Tetap .....	17
2.1.5.1 Klasifikasi Aset Tetap .....	20
2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 .....	25
2.2 Kerangka Pemikiran .....	36
2.3 Penelitian Terdahulu .....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Jenis Data .....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4 Teknik Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	47
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
4.1.1.1 Sejarah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan tanah Provinsi Kepulauan Riau.....	47
4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.....	48
4.1.1.3 Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. ....	50
4.1.2 Penyajian Data .....	51
4.1.2.1 Analisis Data Penelitian.....	54
4.2 Pembahasan .....	57

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURRICULUM VITAE***

**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>halaman</b>
1.	Tabel 2.1 Kriteria Material aset tetap.....	25
2.	Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	38
3.	Tabel 4.1.Neraca Dinas PUPR .....	52
4.	Tabel 4.2.Pengungkapan aset tetap Dinas PUPR .....	58

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	halaman
1.	Gambar 2.1 Kerangka pemikiran .....	37
2.	Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
	Lampiran 1 : Pedoman wawancara
	Lampiran 2 : Laporan keuangan
	Lampiran 3 : Kartu Inventaris Barang (KIB)
	Lampiran 4 : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
	Lampiran 5 : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 (PSAP 07)
	Lampiran 6 : Surat Keputusan Pengurus Barang
	Lampiran 7 : Dokumentasi
	Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian
	Lampiran 9 : Uji Plagiat

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Raja Henitia Shafitri. 17622055. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[rajahenitia99@gmail.com](mailto:rajahenitia99@gmail.com)

Berdasarkan penelitian rumusan penelitian ini Bagaimana Pengungkapan Laporan keuangan Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengungkapan Laporan keuangan Aset tetap menurut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau., Untuk menganalisis Pengungkapan Laporan keuangan Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan Teknik pengambilan data dokumentasi dan obeservasi, objek penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai penerapan akuntansi aset tetap berdasar PSAP 07. Hasil penelitian ini adalah pengungkapan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, disajikan pada neraca, CALK dan kartu inventaris barang, hal ini sudah sesuai dengan PSAP 07. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan PSAP 07, secara keseluruhan pengungkapan aset tetap disajikan pada neraca dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan di jelaskan dengan rincian atau pos-pos laporan keuangan. Pengolahan pengakuan aset tetap sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan keterangan lebih lengkap pengungkapan aset tetap di sajikan pada kartu inventaris barang.

Kata Kunci : Akuntansi keuangan, Aset Tetap, PSAP 07

Dosen Pembimbing I : Salihi, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Hasnarika,S.Si.,M.Pd



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF FIXED ASSET ACCOUNTING BASED ON PSAP 07 IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, SPATIAL PLANNING AND LAND OF RIAU ISLANDS**

*Raja Henitia Shafitri. 17622055. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang*  
[rajahentia99@gmail.com](mailto:rajahentia99@gmail.com)

*Based on the research formulation of this research, How is the Disclosure of Financial Statements of Fixed Assets of the Department of Public Works, Spatial Planning and Land Affairs of the Riau Islands Province based on Government Accounting Standards (SAP) 07? . The purpose of the study was to determine the disclosure of fixed assets financial statements according to the Public Works Department, spatial and land management of the Riau Islands Province,, to analyze the disclosure of fixed assets financial statements of the Public Works Department, spatial and land planning of the Riau Islands Province whether it was in accordance with Government Accounting Standards (SAP). ) 07.*

*The method used in this study is qualitative, with documentation and observation data collection techniques, the object of this research is the Department of Public Works, spatial planning and land of the Riau Islands Province. The benefit of this research is to provide information regarding the application of fixed asset accounting based on PSAP 07. The results of this study are the disclosure of fixed assets in the Department of Public Works, Spatial Planning and Land of the Riau Islands Province, presented on the balance sheet, CALK and inventory card, this is already in accordance with PSAP 07. It can be concluded that the disclosure of fixed assets of the Department of Public Works, Spatial Planning and Land of the Riau Islands Province is in accordance with PSAP 07, overall disclosure of fixed assets is presented on the balance sheet and notes to financial statements (CALK) and is explained in detail or financial statement items. The processing of the recognition of fixed assets has been carried out in a computerized manner and more complete information on the disclosure of fixed assets is presented on the goods inventory card.*

*Keywords: Financial accounting, Fixed Assets, PSAP 07*

*Supervisor I : Salihi, S.E., M.Ak*

*Supervisor II : Hasnarika, S.Si., M.Pd*

# **BAB I**

## **PENDAHULAUN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban secara berkelanjutan dan ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain hal itu sistem kehidupan bernegara yang dipengaruhi oleh reformasi politik di Indonesia yang menuntut publik untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka sehingga dapat membantu mewujudkan (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntansi merupakan ilmu yang dikembangkan pada mulanya di lingkungan bisnis dikarenakan pada lingkungan tersebut banyak pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan dan bahkan hal tersebut menjadi pengukuran paling penting bagi pengguna informasinya. Pengembangan akuntansi selanjutnya diarahkan kepada organisasi dengan tujuan selain *profit* seperti pada awalnya akuntansi dikembangkan sebagai perantara komunikasi antara penyedia sumber dan pengendali sumber daya. Adapun Lembaga dengan tujuan non profit seperti pemerintahan, Yayasan dan Lembaga dengan konteks non *profit* lainnya mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi setelah di adopsi sesuai dengan karakteristik organisasinya.

Dalam memenuhi informasi keuangan dibutuhkan sebuah laporan keuangan, laporan keuangan yang dibuat bertujuan untuk mempermudah entitas melihat transaksi - transaksi keuangan dan posisi keuangan dalam suatu periode

pelaporan. Hal utama yang dapat diketahui dalam pemakaian laporan keuangan untuk melihat nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penilaian kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan, dan memudahkan untuk ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai langkah dalam mewujudkan *Good Governance* yang baik diperlukan adanya suatu perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, perubahan tersebut harus di dasari dan pedoman yang jelas dan kuat yaitu dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia saat ini memasuki masa pengembangan baru akuntansi pemerintahan dengan penggunaan basis akrual untuk akuntansinya, hal ini di harapkan dapat memudahkan bagi penurunan dihitung pada penilaian aktiva tetap di sektor pemerintahan. Pemerintahan sendiri telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditetapkan pada peraturan pemerintahan (PP) Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 dalam pembahasan yang sama. Kedua SAP tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga pada PP Nomor 24 tahun 2005 tidak memiliki sedikitpun perubahan sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat dua SAP, dimana dalam lampiran satu mengenai SAP yang berstandar akrual, dan pada lampiran kedua SAP berstandar kas yang menuju akrual. Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut dapat memudahkanbasis Lembaga

pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan dan menciptakan *Good Governance* yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintahan (PP) pada lampiran kesatu menyatakan anggaran tahun 2010 dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua, tetapi apabila terdapat lembaga yang belum bisa menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua dapat menggunakan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrua yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah lampiran kedua selama transisi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrua dapat disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua selambat -lambatnya pada anggaran tahun 2014. Penggunaan secara menyeluruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua ditetapkan pada anggaran tahun 2015.

Dalam menghadapi tuntutan dalam penerapakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau harus tunduk dan ikut serta dalam menerapkan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis Akrua. Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan tanah) ikut berpartisipasi dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dalam penyajian informasi mengenai entitas pelaporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aset tetap pada suatu instansi tidak disarankan sebagai pinjaman melainkan harus milik instansi secara sah dan jelas.

Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan adalah aset tetap, aset tetap berperan besar dalam melakukan kegiatan pemerintahan sehari – hari, maka dari itu aset tetap di dalam pemerintahan di anggap penting. Aset tetap bertujuan memberikan manfaat jangka Panjang pada masa mendatang, tidak adanya keberadaan aset tetap akan menyulitkan sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan kebutuhannya. Dan aset tetap yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan opini pada BPK, oleh sebab itu aset tetap menjadi elemen penting didalam sebuah laporan keuangan.

Menurut Rais, (2020) Aset merupakan sumber daya ekonomi yang penguasaanya dan dimiliki oleh pemerintahan sebagai dari peristiwa masa lalu dan diharapkan nilai sumber daya ekonomi pada masa mendatang dapat diperoleh.baik oleh pemerintah ataupun masyarakat yang dapat diukur dengan satuan uang, termasuk juga sumber daya non keuangan yang dibutuhkan dalam penyedia jasa masyarakat umum serta sumber - sumber yang dipelihara dengan alasan sejarah dan budaya.

Menurut Rais, (2020) aset tetap merupakan aset berwujud yang umur manfaat nya memiliki lebih dari dua belas bulan untuk dapat digunakam dalam aktivitas pemerintahan untuk masyarakat umum, seacara umum penggolongan aset tetap melalui sudut pandang yaitu: aset berwujud, contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, inventaris dan aset tidak berwujud, contohnya hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain dan dari sudut pandang penyusutan: yaitu aset tetap yang dapat disusutkan, contohnya kendaraan, gedung, mesin, dan lain-lain. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan, contohnya tanah.

Menurut Rais, (2020) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tahun 2010 mengungkapkan bahwa biaya perolehan dinyatakan untuk aset tetap terdiri dari harga beli dan kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau domisili di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring” Jl. Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung C2 Lt1 Pulau Dompok Tanjungpinang.

Pada pemerintahan provinsi kepulauan Riau, jika dilihat tatanan pemerintahan dalam pengelolaan aset tetap yang di Kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah aset tetap yang cukup banyak dan nilai yang besar, untuk mewujudkan

tatanan pemerintahan yang baik dan benar dalam pengelolaan aset tetap seharusnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola pencatatan akuntansi aset tetap berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 (PSAP 07) Tentang Aset Tetap,

Perolehan aset tetap memerlukan investasi yang signifikan, manajemen aset yang baik, dan penerapan prosedur yang handal sesuai dengan ketentuan pernyataan akuntansi yang umum yang mengatur tentang perlakuan akuntansi Terhadap aset tetap mulai dari pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Aset tetap yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau perlu adanya perlakuan aset tetap berdasarkan pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*). Pada masing-masing aset tetap harus diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi, agar hal tersebut dapat sejalan dengan prinsip akuntansi yang sebenarnya, maka harus disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap.

Berdasarkan penelitian Rais, Abd, (2020) penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAP 07 pada Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan pengukuran pengklasifikasian aset tetap, pengukuran aset tetap,

penyusutan aset tetap, dan pengungkapan aset tetap. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sahril Rumberu, (2018) dinas pekerjaan umum provinsi Sulawesi Utara secara kelembagaan tidak melakukan pencatatan atas aset tetap tetapi dilakukan oleh lembaga lain yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara, tentu hal ini tidak sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Berdasarkan Uraian Masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07 ?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pengungkapan laporan keuangan Aset tetap tahun 2020 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.



## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau”. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan laporan keuangan Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu dan wawasan mengenai Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, pengenalan, mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.

- b. Bagi tempat penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pengambilan keputusan yang

baik dimana nantinya dapat memberikan pengetahuan untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 07.

c. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian atau membahas lebih lanjut mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 07.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan penelitian ini diajukan lima bab yang diawali hal-hal yang bersifat umum, namun berhubungan dengan penulisan yang disajikan dan kemudian pada bab-bab selanjutnya penulis membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul dan disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan akan sangat mempermudah para pembaca memahami bahkan lebih mengerti tentang apa saja yang dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini. Adapun pembagian sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian secara singkat mengenai penggambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab dua ini mencakup kajian teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai tinjauan ataupun landasan teori dalam menganalisis pemecahan masalah yang dikemukakan. teori-teori ini diambil dari beberapa sumber literatur dan buku-buku rujukan yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan yang nantinya akan mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi penjelasan jenis penelitian, jenis data yang digunakan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber, serta metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data,

analisis hasil penelitian, jawaban atas rumusan masalah dan hasil dari perbandingan dengan teori sebelumnya.

## **BAB V**

### **: PENUTUP**

Merupakan penjelesan mengenai perumusan kesimpulan berdasarkan hasil analisa dari bab terdahulu sesuai dengan pembahasan penelitian, rumusan masalah, bukti analisis serta menjawab tujuan dari penelitian, di dalam bab ini juga peneliti memberikan saran penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi**

Menurut Irfan, (2018) dalam menjalankan ekonomi dan sosial akuntansi sangat berperan penting. Keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu, pemerintah, badan usaha lain ditentukan dalam penggunaannya pada sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan.

Menurut Hartono, (2018) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara dalam unit moneter atas transaksi keuangan dan kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut.

Menurut Khusnaini, (2017) Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang memproses data keuangan yang berasal dari transaksi usaha/kegiatan ekonomi suatu perusahaan (entitas ekonomi) menjadi laporan keuangan yang digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan

##### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo, (2018) pembagian akuntansi sektor publik terdiri dari Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Rumah Sakit, Akuntansi Lembaga Pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lainnya. Beberapa hal penting dalam tujuan

akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan efisien dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan secara cepat dan efektif program.

Akuntansi sektor publik secara teoritis merupakan bidang akuntansi yang memiliki ruang lingkup Lembaga- Lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Yayasan, parta politik, perguruan tinggi dan organisasi- organisasi nonprofit lainnya

Menurut Nida, (2016) peran utama dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan atas pengalokasian sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

### **2.1.3 Organisasi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo, (2018) organisasi sektor publik saat ini sedang menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan, pergerakan organisasi sektor publik dalam lingkungan yang sangat kompleks, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultur dan faktor demografi.

1. Faktor Ekonomi :

1) Cadangan devisa

- 2) Nilai tukar mata uang
  - 3) Utang atau bantuan luar negeri
  - 4) Teknologi
  - 5) Infrastruktur
  - 6) Sektor Informal
  - 7) Kemiskinan Dan Kesenjangan Ekonomi
  - 8) Sektor Informal
  - 9) Pertumbuhan ekonomi
  - 10) Pertumbuhan pendapatan perkapita
  - 11) Tingkat inflasi
  - 12) Struktur produksi
  - 13) Arus modal dalam negeri
  - 14) Tenaga kerja
2. Faktor Politik :
- 1) Elit Politik dan masa
  - 2) Ideologi negara
  - 3) Jaringan Internasional
  - 4) Kelembagaan
  - 5) Hubungan antar negara dan masyarakat
  - 6) Legitimasi pemerintah
  - 7) Rezim yang berkuasa
3. Faktor Kultural :
- 1) Sosiologi Masyarakat

- 2) Karakteristik Masyarakat
  - 3) Tingkat Pendidikan
  - 4) Keragaman suku, agama, ras, Bahasa, dan budaya
  - 5) Sistem Nilai di masyarakat
  - 6) Historis
4. Faktor Demografi :
- 1) Pertumbuhan penduduk
  - 2) Struktur usia penduduk
  - 3) Migrasi
  - 4) Tingkat Kesehatan

#### **2.1.4 Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Engka, (2017) Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah proses dari bukti transaksi keuangan sampai proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik yang disusun secara sistematis pada pengelolaan keuangan pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan didasari oleh konsep lingkungan akuntansi pemerintahan, karakteristik dan tujuan akuntansi serta pelaporan keuangan mempengaruhi lingkungan operasional organisasi pemerintahan, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan memiliki ciri dasar seperti struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, pengendalian keuangan pemerintahan sedangkan konsep akuntansi lainnya adalah peran laporan keuangan, kriteria yang memadai seperti nilai relevansi, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami harus dipenuhi untuk laporan keuangan yang berkualitas. Bentuk



pertanggungjawaban pemerintahan kepada *Stakeholder* adalah dengan pelaporan keuangan dengan mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk elemen aset yang terdapat pada neraca, dimana dibuat kan pelaporan pertahun dan anggarannya.

Menurut nida, (2016) Akuntansi mendukung pemerintahan untuk melakukan pertanggungjawaban keputusan atas jenis sumber daya apa yang akan dipenuhi dengan kata lain Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik. Didalam sebuah pelaporan keuangan pemerintahan tidak ada laporan laba rugi (*income statement*) dikarenakan pemerintahan tidak berorientasi pada laba. Ketika anggaran tersebut dibukukan pengeluaran modal maka pemerintahan akan membukukan anggaran.

Menurut Rais, (2020) Pemerintahan tidak bertujuan dalam mendapatkan laba dan yang berkaitan dengannya, akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang berhubungan dengan bidang keuangan negara. Dari proses anggaran sampai dengan pelaksanaan serta pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan.

Menurut Tompodung, (2021) akuntansi pemerintahan merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintahan serta penafsiran informasi keuangan atas suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi juga sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran,

pencatatan, pelaporan transaksi keuangan dari lembaga pemerintahan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak eksternal pemerintahan yang memerlukan.

Menurut kapa, (2021) akuntansi pemerintahan merupakan (*Pubik Finance*) atau dengan kata lain akuntansi pemerintahan adalah yang menerapkan akuntansi di sektor keuangan negara. Utamanya pada tahap (*budget execution*) yang merupakan tahap pembiayaan, termasuk beberapa dampak yang ditimbulkan sementara atau permanen disemua tingkat unit dan penghasilan. Akuntansi pemerintahan merupakan tahap pendidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan dengan tujuan pengambilan keputusan.

Menurut kapa, (2021) akuntansi pemerinatahan mempraktikkan sistem pencatatan *single entry* sebelum mereformasi tata kelola finansial negara. *Single entry* merupakan pencatatan satu kali transaksi sehingga mempengaruhi penambahan simpanan yang hendak tercatat disisi pendapata maupun transaksi ekonomi yang mempengaruhi penurunan simpanan yang hendak tercatat disisi pengeluaran.

### **2.1.5 Aset Tetap**

Menurut Tompodung, (2021) aset tetap merupakan aset sebuah organisasi yang mempunyai wujud dan tidak dijual kembali, memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan organisasi memperoleh nya untuk melaksanakan kegiatan. Aset tetap digunakan oleh sebuah organisasi untuk lebih dari satu tahun. Sifat dari aset tetap relatif permanen.

Menurut kapa, (2021)aset tetap dikenal sebagai *Fixed asset* atau *Plant asset* dengan penjelasan seperti *tanggible asset* atau harta dengan wujud yang

memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dengan nilai material dan menjadi kegiatan operasional perusahaan.

Menurut dwitayanti, (2018) aset tetap merupakan aset yang berwujud digunakan dalam pemerintahan dan untuk kepentingan umum, umur aset tetap memiliki nilai manfaat dua belas bulan. Aset tetap juga sebagai salah satu pos di neraca di samping aset lancar, dana cadangan, investasi jangka panjang, dan aset lainnya.

Menurut nida, (2016) aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dimanfaatkan masyarakat umum yang memiliki umur manfaat sampai dengan dua belas bulan. Perolehan aset tetap didapatkan dalam bentuk siap pakai atau di bangun terlebih dahulu.

Menurut Engka, (2017) aset tetap merupakan perolehan aset tetap didapatkan dengan berbagai cara perolehan seperti pertukaran, leasing, pembelian, prmbangunan sendiri dan hibah. Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Aset tetap memiliki fisik dan memiliki umur manfaat ekonomis selama dua belas bulan.

Menurut Saaduddin, (2018) aset tetap merupakan aset yang memiliki wujud yang memiliki umur relatif permanen dan digunakan untuk operasional perusahaan sehari - hari dalam rangka kegiatan normal dengan tujuan tidak diperjualbelikan dan memiliki nilai relatif material.

Menurut Parwati, (2016) Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan bisnis, di mana kekayaan diperoleh dalam bentuk siap pakai atau telah

dibangun sebelumnya, bersifat permanen dan dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan untuk waktu yang relatif lama dan memiliki nilai material yang cukup. Aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu yang salah satunya melibatkan aktiva tetap digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya dalam menghasilkan produk atau jasa

Pengertian atau Pengertian Harta Tetap menurut Para Ahli, Harta Tetap atau lainnya juga biasa disebut sebagai aset tetap adalah aset atau sumber daya suatu entitas-entitas (perusahaan) yang memperoleh dan mengendalikan sebagai akibat dari kegiatan ekonomi (transaksi) di masa lalu. aset tetap yang digunakan untuk operasi kegiatan komersial badan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam produksi barang dan jasa, peranan aktiva tetap sangatlah penting. misalnya tanah/tanah dan bangunan untuk produksi, mesin dan peralatan lainnya digunakan sebagai alat produksi dan lainnya.

Menurut PSAP, (2010) Aset adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan akan datang harus dikumpulkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan mungkin diukur dalam istilah moneter, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada publik dilestarikan karena alasan sejarah dan budaya. aset tetap adalah aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh Khalayak ramai,

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelapor tetapi digunakan oleh organisasi lain, seperti instansi pemerintah lainnya, universitas dan penyedia layanan.
2. Hak Atas Tanah, aktiva tetap adalah harta yang dimiliki untuk dikonsumsi dalam kegiatan pemerintah, seperti: bahan dan persediaan. Karena adanya ketentuan tentang kewajiban menyusun neraca dalam rangka laporan keuangan pemerintah, akuntansi/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap adalah sentral akuntansi, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup besar dan memiliki kompleksitas yang besar. Akuntansi aset tetap telah ditentukan dalam standar akuntansi Tata Kelola (PSAP) No. 7 (PSAP 07), Lampiran I PP 71 2010. PSAP 07 memberikan pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan pengakuan, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti pembelian pertama aset tetap waktu, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, akuisisi aset penyisihan/iuran dan amortisasi.

#### **2.1.5.1 Klasifikasi Aset Tetap**

Menurut Tompodung, (2021) pengklasifikasian aset tetap dikelompokkan ke beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Gedung dan bangunan
2. Tanah
3. Mesin dan peralatan
4. Jalan

5. Irigasi
6. Kontruksi dalam pekerjaan
7. Aset tetap lainnya

Aset tetap dapat diklasifikasikan juga menjadi, sebagai berikut :

- 1) Aset tetap yang permanen (umurnya tidak memiliki batas)
- 2) Aset tetap dengan umur terbatas, jika masa penggunaannya sudah habis akan digantikan dengan aset tetap sejenisnya.
- 3) Aset tetap dengan umur terbatas, jika masa penggunaannya sudah habis tidak dapat digantikan dengan aset tetap sejenisnya.

Menurut kapa, (2021) aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan fungsi atau sifatnya pada kegiatan operasional entitas, sebagai berikut :

- 1) Tanah, dibagi menjadi aset tetap diperoleh sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah, maupun dalam situasi yang tidak mungkin. Tanah adalah barang publik yang lengkap penting untuk operasi pemerintah dan pelayanan masyarakat
- 2) Alat -alat dan mesin, terdiri atas mesin, kendaraan, peralatan elektronik, inventaris kantor, maupun peralatan lain dengan nilai dan masa manfaat di atas satu tahun, serta berkondisi siap guna.
- 3) Gedung dan bangunan, Gedung dan bangunan sejenisnya dengan kondisi baik dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dengan kondisi baik dan yang dimiliki serta dikuasai oleh pemerintahan.

- 5) Aset tetap lainnya, seperti buku perpustakaan, sarana perpustakaan, buku terbitan lama, barang dengan corak kesnian dan kebudayaan
- 6) Kontruksi pengerjaan golongan barang tercatat dengan nominal biaya yang digunakan sampai dengan akhir waktu pengerjaan.

Menurut dwitayanti, (2018) pengklasifikasian aset tetap sebagai berikut :

- 1) Tanah

Tanah yg dikelompokkan menjadi aset permanen adalah tanah yg diperoleh menggunakan maksud buat digunakan pada aktivitas operasional pemerintah & pada syarat siap digunakan. Termasuk pada penjabaran tanah ini merupakan tanah yg dipakai buat gedung, bangunan, jalan, irigasi, & jaringan. Sesuai penggunaannya, sifat dan peruntukannya, tanah bisa diklasifikasikan lebih lanjut sebagai dua kelompok besar, yaitu:

- a) tanah untuk gedung dan bangunan,
- b) tanah untuk bukan gedung & bangunan, misalnya tanah buat jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah buat pertanian, dan tanah buat perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, namun tergantung dalam kebutuhan rincian fakta yg dibutuhkan oleh entitas bersangkutan.

- 2) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin termasuk mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan semua inventaris kantor dan peralatan lainnya yang bernilai substansial dan yang masa manfaatnya melebihi 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan

berdasarkan jenisnya seperti peralatan kantor, komputer, peralatan transportasi (jalan, laut dan udara), peralatan komunikasi, peralatan medis. peralatan, alat berat, peralatan belanja, peralatan olahraga dan rambu.

### 3) Gedung dan bangunan

Bangunan dan bangunan termasuk semua bangunan dan struktur yang diperoleh untuk penggunaan pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Bangunan dan struktur dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, gedung gereja, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, museum bangunan. Bangunan gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari elemen struktur fisik, komponen pendukung utama berupa teknik mesin (lift, instalasi listrik dengan generator dan instalasi pendingin AC) dan pendukung lainnya, termasuk saluran air dan telepon. Setiap komponen memiliki masa manfaat yang berbeda, sehingga *payback period* juga berbeda dan memerlukan bentuk perawatan yang berbeda. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub akun pencatatannya yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, seperti sebagai berikut :

- a) Gedung
- b) Bangunan fisik
- c) Tempat parkir, pagar, jalan dan taman
- d) Instalasi AC
- e) Generator dan instalasi listrik



- f) Lift
- g) Penyediaan air, air limbah dan saluran air bersih
- h) Saluran telepon.

Dalam pengakuan akuntansi untuk gedung bertingkat disarankan untuk diperincikan sebagai berikut :

- a) Terdapat perincian yang jelas untuk masing -masing komponen bangunan yang mempunyai dua umur manfaat yang sama. Dokumen dapat digunakan sebagai perolehan data untuk perincian tersebut.
  - b) Penawaran yang menjadi dasar kontrak kontruksi pekerjaan Borongan bangunan.
- 4) Irigasi, jalan dan jaringan
- Jalan, irigasi, dan jaringan meliputi jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh negara, dimiliki dan/atau dikelola oleh negara, serta siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan digunakan oleh masyarakat umum serta kegiatan pemerintah, akuntansi akrual aset tetap, tergantung pada kebutuhan perusahaan, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut, misalnya, menjadi jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, tanaman air. , tenaga listrik, Generator. peralatan, peralatan distribusi listrik, jaringan pipa gas, peralatan distribusi gas, jaringan telepon. Klasifikasi yang tepat memudahkan untuk menentukan kebijakan penyusutan serta kebijakan pemeliharaan untuk aset tersebut.
- 5) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya termasuk aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok aset tetap di atas pada saat diterima, digunakan dan siap pakai untuk kegiatan yang dioperasikan oleh pemerintah. Aset digolongkan sebagai aset berwujud lainnya antara lain perpustakaan/koleksi buku dan bukan buku, seni/budaya/olahraga, hewan, ikan dan tumbuhan. Kategori Properti berwujud lainnya, mencakup biaya perbaikan properti berwujud untuk perbaikan, yaitu biaya perbaikan properti berwujud bukan milik dan biaya pemisahan ruang kantor yang tidak dimiliki.

#### 6. Kontruksi dalam pengerjaan

Kontruksi dalam pekerjaan termasuk aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

### **2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 merupakan standar akuntansi yang diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur akuntansi aset tetap. Permasalahan utama yang sering ditemui dalam aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian Kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### 1. Pengakuan Aset Tetap

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 aset tetap dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memiliki umur nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, biaya perolehan aset nya dapat diukur secara

andal, aset tetap tidak perjualbelikan Kembali dalam operasioanl normal entitas, dibangun dan diperoleh dengan tujuan untuk digunakan.

Menurut Parwati, (2016) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi timbul. Masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan pasti dan dapat diakui sebagai aset tetap sesuai dengan Lampiran II.08 Tahun 71. Aset 2010 harus berwujud dan memenuhi kriteria. Adapun sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Aset tetap memiliki umur manfaat dua belas bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- g. Nilai rupiah pembelian barang matrial atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut mempunyai batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Material Aset Tetap**

No	Uraian	Harga
1	Tanah	Rp xxx
2	Peralatan dan mesin	Rp xxx
3	Alat berat	Rp xxx
4	Alat bengkel	Rp xxx
5	Alat ukur	Rp xxx
6	Alat pertanian	Rp xxx
7	Alat peternakan	Rp xxx
8	Alat kantor	Rp xxx
9	Alat rumah tangga	Rp xxx

10	Alat studio	Rp xxx
11	Alat komunikasi	Rp xxx
12	Alat kedokteran	Rp xxx
13	Alat laboratorium	Rp xxx
14	Alat keamanan	Rp xxx
15	Gedung	Rp xxx
16	Bangunan	Rp xxx
17	Bangunan monumen	Rp xxx
18	Jalan	Rp xxx
19	Irigasi	Rp xxx
20	Jaringan	Rp xxx
21	Jembatan	Rp xxx
22	Bangunan air atau irigasi	Rp xxx
23	Instalasi dan jaringan	Rp xxx
24	Buku dan perpustakaan	Rp xxx
25	Barang kesenian	Rp xxx
26	Barang kebudayaan	Rp xxx
27	Hewan ternak dan tumbuhan	Rp xxx
28	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp xxx

*Sumber : Parwati, (2016)*

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima

entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan buktisecara hukum dikarenakan.

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut diakui harus pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS), adapun jurnal pengakuannya adalah sebagai berikut :

Belanja modal	Rp
Piutang dari BUD	Rp
(mencatat realisasi belanja modal)	
Belanja modal	Rp.
Kas di Kas Daerah	Rp.
(mencatat realisasi belanja modal)	

Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tanah	Rp
Peralatan dan mesin	Rp
Gedung dan bangunan	Rp
Jalan, irigasi dan jaringan	Rp
Aset tetap lainnya	Rp
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp
Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp

(untuk merealisasikan semua perolehan jenis aset tetap)

Menurut Tompodung, (2021) pengakuan aset tetap dapat diakui wujudnya dan memiliki umur manfaat dua belas bulan atau satu tahun, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, aset tetap diperoleh dengan cara pembelian atau dibangun dari awal.

Menurut kapa, (2021) pengakuan aset tetap menjelaskan bila anggaran dana pemerolehan aktiva tetap akan mendapat pengakuan sebagai aktiva jika: ‘

- 1) Kemungkinan besar entitas bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis pada masa mendatang
- 2) Biaya pendapatan dapat diukur secara andal.

Aset dapat diakui sebagai aset tetap jika entitas telah memperkirakan akan mempergunakan aset itu selama lebih dari satu periode.

## 2. Pengukuran aset tetap

Menurut Tompodung, (2021) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehantidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan buktipembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya, aset tetap dinilai dari biaya perolehan.

Menurut Parwati, (2016) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### 1) Penilaian awal aset tetap

penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui

pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Untuk kedua hal tersebut aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## 2) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya persiapan tempat
- b. Biaya pengiriman awal
- c. Biaya simpan dan bongkar muat
- d. Biaya pemasangan
- e. Biaya professional arsitek dan dan insinyur
- f. Biaya kontruksi

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Nilai tanah juga



meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan, jalan irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Pengecualian Komponen Biaya Perolehan aset tetap yaitu:

- a. Biaya administrasi dan biaya umum, sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- b. Biaya permulaan dan pra – produksi, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

### 3) Kontruksi dalam pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai kontruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Kontruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan de dalam aset tetap.

### 4) Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

### 5) Pertukaran aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

### 6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### 7) Pengeluaran setelah perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksud yang telah disebutkan di atas harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Kebijakan akuntansi mengenai *capitalization thresholds* harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 8) Pengukuran berikut terhadap pengakuan awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Bila terjadi kondisi yang memungkinkan revaluasi, maka aset tetap disajikan berdasarkan penyesuaian pada masing – masing aset tetap yang direvaluasi, dan pada rekening ekuitas (sebesar selisih nilai revaluasi dengan nilai tercatat).

Penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Nilai penyusutan untuk masing – masing periode

diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, adapun persyaratan penyusutan nya sebagai berikut :

- a) Nilai buku yang disusutkan diketahui nilainya
- b) Identifikasi aset nilai nya menurun
- c) Harus diketahui masa manfaat nya
- d) Diketahui kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah antara lain:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*). Metode ini menghasilkan nilai sama untuk setiap periode akuntansi.
- b) Metode saldo menurun ganda(*double declining balance method*). Metode ini dapat dilakukan dengan cara tarif metode garis lurus dikaitkan dua, namun dasar penyusutannya adalah nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan
- c) Metode unit produksi(*unit of production method*).

### 3. Pengungkapan Aset tetap

Menurut Tompodung, (2021) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing aset tetap sebagai berikut: dasar penilaian yang digunakan untuk

menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; dan informasi penyusutan

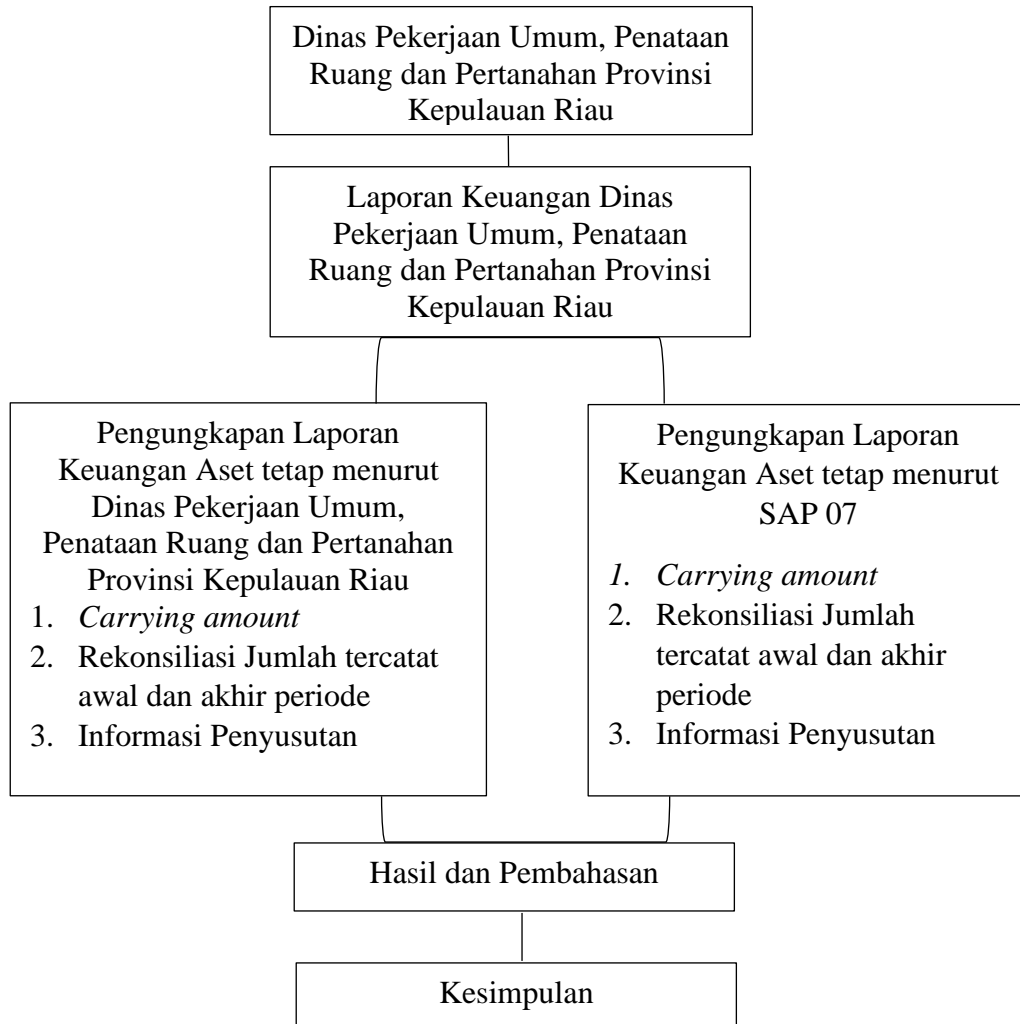
Menurut Parwati, (2016) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- b) Rekonsiliasi pada jumlah tercatat di awal dan akhir periode yang menunjukkan
  1. Penambahan
  2. Pelepasan
  3. Akumulasi penyusutan
  4. Mutasi aset tetap lainnya
- c) Informasi penyusutan, sebagai berikut :
  1. Nilai penyusutan
  2. Metode penyusutan yang digunakan ‘
  3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
  4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Penulis, 2022*

Berdasarkan Gambar 2.2 Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa penelitian ini dimulai dengan melakukan pengamatan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi bahan pengamatan ialah laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang mencatat Aset tetap yang di dapat dari hasil pendokumentasian terlebih dahulu, setelah melakukan pengamatan pada

laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pada penyajian laporan keuangan berdasarkan penerapan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, dan akan di bandingkan dengan penyajian laporan keuangan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 07, dan selanjutnya akan dianalisa serta di Tarik sebuah kesimpulan dari penilitian ini.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun sebagai bahan referensi penelitian terdahulu ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Penelitian terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil dan Pembahasan
1	Rais, (2020)	Penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng	Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi, teknis analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan data-data yang telah disegmentasikan yang kemudian hasil tersebut di bandingkan dengan teori PSAP 07 Aset tetap, hasil penelitian ini adalah menunjukkan pengklasifikasian aset tetap di Inspektorat Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan urutan yang ada di PSAP No. 07 dengan urutan yaitu 1) Tanah, 2) Peralatan dan Mesin, 3) Gedung dan Bangunan, 4) Aset Tetap Lainnya, 5) Akumulasi penyusutan. Tanah yang digunakan oleh inspektorat Kabupaten Bantaeng untuk membangun kantor, merupakan kepemilikan dari Inpektorat Kabupaten Bantaeng. Aset tersebut mencakup Gedung dan tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional Inspektorat Daerah Kabupaten

			<p>Bantaeng, masa manfaat Gedung Inspektorat daerah Kabupaten Bantaeng memiliki masa manfaat Gedung 50 tahun yang diketahui dari laporan penyusutan Gedung dan tanah Inspektorat Kabupaten Bantaeng. Penerapan akuntansi aset tetap di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng sudah sesuai dengan PSAP 07 dengan pengukuran pengklasifikasian aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07 Paragraf lima belas, pengukuran aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07 paragraf dua puluh, penyusutan dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAP 07.</p>
2	kapa, (2021)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo</p>	<p>jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis data kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan mengenai aset tetap PSAP 07, hasil penelitian ini adalah pengukuran aset tetap di BKD kabupaten Nagekeo tidak sesuai, karena aset tetap tanah diukur berdasarkan harga perolehan, pada penerapannya belum meliputi semua anggaran pada perolehan tanah. Hasil penilaian awal aktiva tetap di BKD Kabupaten Nagekeo terdapat keraguan sehingga BPK menyampaikan usulan guna mengembalikan aktiva tetap hasil penilaian ke nilai pemerolehan nilai wajar atau NJOP berdasar periode 2019, pengungkapan laporan keuangan di BKD Kabupaten Nagekeo tidak mengungkapkan tiap jenis aktiva tetap, atau dasar penilaian yang dipergunakan selama menetapkan nilai tercatat (<i>Carrying Amount</i>). Dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa BKD kabupaten Nagekeo adanya relevansi dengan PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap yang mendorong BKD Kabupaten Nagekeo melaksanakan Akuntansi Aset tetap dengan optimal,</p>



			<p>namun selama pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran sesudah pemerolehan, dan pengungkapan pada penentuan anggaran dana pemerolehan tanah yang terlaksana atas dasar pengadaan barang dan jasa meliputi anggaran dana pendukung sampai tanah itu bisa dipergunakan, termasuk pembayaran sertifikasi tanah maupun ketika merekonsiliasi akhir belum terkapitalisasi sebagai biaya pemerolehan tanah, yang memicu anggaran dana pemerolehan tanah tanpa bisa ditentukan secara andal.</p>
3	Engka, (2017)	<p>Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>jenis penelitian kualitatif dengan data dari berbagai literatur dan wawancara mengenai akuntansi aset tetap, hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi utara No. 30 Tahun 2014 mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menjadi acuan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Diklat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 Pengklasifikasian, Pengakuan, Pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah pemerolehan, penyusutan, Penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 sudah sesuai</p>

			dengan PSAP 07 Akuntansi Aset tetap.
4	Savitri, (2021)	Analisis Penerapan PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng	jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah pengklasifikasian aset tetap telah diklasifikasikan sesuai dengan PSAP 07 berdasarlam kesamaan sifat dan dan fungsinya dalam kegiatan operasi yang terdiri dari tanah, termasuk yang digunakan sebagai Gedung kantor Badan Narkotika Nasional (BNN). Perlengkapan dan mesin: perlengkapan kantor, meja dan kursi, lemari, mobil, dan sepeda motor, (3) Bangunan meliputi bangunan gedung sebagai tempat kerja yang siap pakai untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum. Pengakuan aktiva tetap Badan Narkotika Nasional sudah sesuai karena pengakuan aset tetap nya berdasarkan pada data yang relevan dengan menggunakan metode akrual basis. Pengukuran aktiva tetap di nilai dengan pengukuran harga tunai, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaporan aset tetap di Badan Narkotika Nasional sudah sesuai dengan PSAP 07.
5	Assey, (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian aset tetap di otoritas pemerintah daerah di Tanzania	jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuisisioner pada sembilan LGA terpilih, yaitu Dewan Kota Kinondoni, Dewan Kota Ilala, Dewan Distrik Moshi, Dewan Kota Moshi, Dewan Distrik Arusha, Dewan Distrik Meru, Dewan Distrik Hai dan Dewan Distrik Babati berdasarkan kenyamanan jangkauan. Hasil penelitian ini menunjukkan verifikasi aset tetap dan penelusuran aset tetap memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian aset, dalam peninjauan starategi dan pedoman dalam pelacakan aset pemerintahan Tazmania seharusnya

			<p>lebih fokus. Untuk meningkatkan akuntabilitas aset pemerintah Tasmania harus lebih menekankan kebijakan manajemen dan peninjauan pedoman, berdasarkan hasil penyebaran kusioner di beberapa LGA, ada 4 LGA yang penganganan manajemen aset nya tidak ditangani secara khusus, meskipun LGA memiliki prosedur sendiri dalam mengambil keputusan, tetapi Pemerintah Tasmania tetap memberikan beberapa kekuatan untuk LGA mengambil keputusan.</p>
--	--	--	---

*Sumber : Data diolah penulis, 2022*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2017) Metode penelitian kualitatif penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, yang dimana peneliti yang merupakan instrumen kunci serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.

Deskriptif kualitatif merupakan informasi berupa kata-kata atau pengsimbolan kata dengan angka. Data kualitatif biasanya berupa pendapat atau ungkapan yang dapat di observasi serta di amati tetapi tidak bisa di lakukan pengukuran dengan angka, sedangkan menurut Siyoto, (2015) penelitian kualitatif memiliki kaitan antara hasil dari objek penelitian dengan kata-kata atau kalimat serta kejadian yang mencakup keseluruhan objek penelitian.

#### **3.2 Jenis Data**

Berdasarkan penelitian yang berjudul ”Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau”, ada dua jenis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini :

##### **1. Data Primer**

Menurut ali, (2015) Data primer merupakan data asli atau data baru yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Dalam penelitian ini data primer yang penulis

gunakan berupa hasil wawancara dengan Pengurus Barang Pengguna di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. Data Sekunder

Menurut ali, (2015) Data sekunder merupakan Data - data yang perolehannya di dapatkan dari data yang sudah ada. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan laporan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. buku - buku perpustakaan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian tahun 2020.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Menurut Charli, Diana., (2014) wawancara merupakan pengumpulan informasi yang tidak bisa secara langsung diamati di karenakan jarak waktu dan lokasi. Metode ini penulis gunakan untuk melakukan tanya jawab langsung dengan Pegawai Aset di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, adapun rincian pegawai tersebut yaitu Bapak Bambang Sumanto, Amd selaku Pengurus Barang Pengguna.

#### b. Studi pustaka

Menurut Charli, Diana., (2014) studi pustaka Merupakan metode dalam mendalami materi dalam penelitian serta informasi yang ada di dalamnya sudah berupa fakta yang tidak perlu di interprestasikan lagi. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari buku – buku perpustakaan dan penelitian terdahulu mengenai “ Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 di

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau”.

c. Dokumentasi

Menurut Ali., (2015) dokumentasi merupakan metode yang menginventarisir dokumen - dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian untuk di lakukan pengkajian dalam peneltian tersebut. Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan laporan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

d. Observasi

Menurut Ali., (2015) observasi Merupakan metode dengan cara mengamati dan berbaur langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data - data. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Menurut Siyoto, (2015) Analisis data merupakan proses pengurutan dan pengorganisasian data kedalam pola, untuk mendapatkan tema di perlukan kategori dan satuan ukuran dasar. Mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberi kode dan mengkategorikan merupakan pekerjaan dari analisis data kualitatif, mengangkat tema untuk di angkat sebagai substansif merupakan tujuan dari pengorganisasian dan pengolahan data.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan di analisa dengan menggunakan metode :

### 1. Reduksi data

Menurut Siyoto, (2015) reduksi data merupakan perangkuman dengan memperhatikan pemilihan hal- hal penting, fokus pada hal yang penting saja, mencari tema dan pola. Abstraksi biasanya merupakan jalan dalam melakukan reduksi data, abstraksi menurut Siyoto, (2015). Dalam tahap ini penulis akan menyederhanakan hasil wawancara dan observasi untuk memastikan data sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Data dokumentasi berupa neraca dan CALK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

### 2. Penyajian data

Menurut Siyoto, (2015) merupakan susunan sekumpulan informasi yang kemungkinan akan memberikan penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini penulis akan menjabarkan secara sistematis hasil wawancara dengan pegawai di bidang aset mengenai Aset tetap berdasarkan PSAP 07 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses akhir dari analisa data yang merupakan tahap mengutarakan kesimpulan dari data yang di dapat. Penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk mencari makna data yang terkumpul dengan hubungan, persamaan dan perbedaan. Dalam tahap ini penulis akan menyesuaikan pernyataan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai aset tetap berdasarkan PSAP No 7 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- ali, M. g. (2015). *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi Dan Sosial*.
- Assey, T. B. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian aset tetap di otoritas pemerintah daerah di Tanzania. *Jurnal Manajemen Bisnis Afrika*.
- dwitayanti, y. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP NO. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap . *Jurnal Bisnis Darmajaya*.
- Engka, F. K. (2017). Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinis Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Hartono. (2018). *Pengantar Akuntansi II. 2018th ed. Yogyakarta: Deepublish*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Akuntansi/O0FVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+akuntansi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Akuntansi/O0FVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+akuntansi&printsec=frontcover).
- Irfan, A. (2018). *Perpus.Stiehidayatullah.Ac.Id Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/14e0659a437a97db0a7560d6644b766b.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/14e0659a437a97db0a7560d6644b766b.pdf).
- kapa, s. (2021). Analisis Penerapan AkuntansiI Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*.
- Khusnaini. (2017). *Modul Pengantar Akuntansi.* : 1–175.  
<https://klc.kemenkeu.go.id/unit/modul-pengantar-akuntansi/>.
- Mardiasmo. (2018 ). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- nida. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur . *Ekonomika*.
- Parwati, N. (2016). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng. *Universitas Muhammadiyah Makkasar*.
- PSAP. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *SAP 07*.
- Rais, Abd. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Banteng. *Accounting Journal*.
- Saaduddin, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Aset Tanah dan Bangunan Berdasarkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone). *Universitas Negeri Makassar* .



- Sahril Rumbaru. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara . *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 38-45.
- Savitri, N. L. (2021). Analisis Penerapan PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap di Badan Narkotika Nasional (BNN). *Kemajuan dalam Riset Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian Dasar Metodologi Penelitian* . Bandung: Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian-Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tompodung, G. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* .

# *Curriculum Vitae*



Nama : Raja Henitia Shafitri  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 15 Juli 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Umur : 23 Tahun  
Status : Belum Menikah  
Alamat : JL. Gudang Minyak GG R.A, Razak No. 74  
Agama : Islam  
Email : [rajahenitia99@gmail.com](mailto:rajahenitia99@gmail.com)  
No Telp/ WA : 0812-1885-9056

Pendidikan : 1. TK AL-HIKMAH Tanjungpinang  
2. SD Negeri 004 Binaan Tg Pinang Barat  
3. SMP Negeri 4 Tanjungpinang  
4. SMK Negeri 1 Tanjungpinang  
5. STIE Pembangunan Tanjungpinang